

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik melalui belanja modal. Belanja modal menjadi instrumen vital karena memungkinkan pemerintah daerah membangun aset tetap dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antarwilayah. Namun data menunjukkan bahwa rata-rata porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tergolong rendah (sekitar 14 - 16 % dari total belanja) dan realisasi anggaran modal sering berada di bawah jenis belanja lainnya [1]. Di sisi lain, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) terdapat indikasi bahwa belanja daerah mengalami dinamika khusus. Dimana kepala daerah terutama yang petahana dan akan mencalonkan diri kembali untuk menjadi kepala daerah, melakukan peningkatan proyek fisik melalui belanja modal agar program pembangunan terlihat nyata dan berguna secara politik. Perilaku seperti ini dilakukan oleh petahana sebagian besar hanya karena ingin di pilih kembali, dalam artian kata terdapat peluang bagi petahana tersebut untuk terpilih kembali [2].

Dalam konteks tahun politik, perhatian terhadap belanja daerah tidak hanya tertuju pada belanja modal, tetapi juga pada jenis belanja lain yang sensitif terhadap siklus elektoral, khususnya belanja bantuan sosial (bansos). Berbeda dengan belanja modal yang cenderung berorientasi jangka panjang, belanja

bantuan sosial bersifat lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial maupun dinamika politik. Hal ini membuat belanja bantuan sosial sering menjadi instrumen kebijakan yang sensitif, terutama dalam periode menjelang pemilu atau pilkada [3].

Dalam penelitian ini, tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun non-Pilkada, yaitu periode anggaran yang relatif bebas dari tekanan elektoral, sedangkan tahun 2023 ditetapkan sebagai tahun pra-Pilkada, yakni satu tahun sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang secara teoritis merupakan fase paling krusial dalam siklus anggaran politik. Temuan teoritis tersebut juga didukung oleh bukti empiris di Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjelang Pilkada terjadi peningkatan belanja hibah dan bantuan sosial, sementara pola belanja modal cenderung tidak konsisten antar daerah, bergantung pada kapasitas fiskal dan karakteristik wilayah [2][4]. Konsistensi temuan ini memperkuat relevansi penggunaan periode non-Pilkada dan pra-Pilkada dalam menguji indikasi *political budget cycle* pada konteks pemerintah daerah di Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama untuk Pilkada Serentak 2024, Terdapat indikasi bahwa sejumlah pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan proyek fisik melalui belanja modal agar hasil pembangunan terlihat sebelum pemungutan suara. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam evaluasi APBD periode 2020-2025, ditemukan bahwa belanja modal memiliki realisasi tinggi pada tahun non-Pilkada yaitu mencapai 91,20%, dan tahun pra-Pilkada turun menjadi 78,77% dari alokasi belanja modal. Ini menunjukkan ada variabilitas, tapi justru tidak naik menjelang Pilkada [5].

Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi belanja hingga 30 November tahun pra-Pilkada sebesar Rp29,34 triliun atau 90,91% dari anggaran tahunan. Angka ini meningkat 9,25% dibandingkan Oktober tahun pra-Pilkada dan terutama dipicu oleh percepatan proyek infrastruktur. Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun non-Pilkada, realisasi belanja tersebut juga tumbuh sekitar 9,27% [6]. Hal tersebut menunjukkan adanya akselerasi pelaksanaan belanja modal di penghujung tahun, khususnya pada proyek infrastruktur, yang mengindikasikan potensi perilaku oportunistik menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial (bansos) cenderung meningkat pada periode menjelang pemilu dan pilkada, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi politisasi kebijakan sosial. Peningkatan alokasi bansos di daerah pada tahun politik bahkan sering dikaitkan dengan strategi elektoral petahana, sehingga pemerintah pusat dinilai perlu memperketat pengawasan demi mencegah penyalahgunaan APBD [7][8]. Dengan demikian, dinamika kenaikan bansos pada periode pra-Pilkada tidak hanya mencerminkan kebutuhan sosial, tetapi juga mengindikasikan adanya *political budget cycle*, menjadikan variabel belanja bantuan sosial relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Pada tingkat kabupaten/kota, data belanja modal dan belanja bantuan sosial di beberapa kabupaten/kota besar Indonesia periode non-Pilkada dan pra-Pilkada memunculkan fenomena menarik yang mengindikasikan perilaku oportunistik kepala daerah. Analisis data belanja modal dan belanja bantuan sosial pada

pemerintah daerah kabupaten/kota memperlihatkan pola heterogen antara tahun non-Pilkada dan pra-Pilkada seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Data Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial

Kab/Kota	2022 (Miliar)		%	2023 (Miliar)		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal						
Kota Medan	1.707,7	1.617,5	94	2.368	1.392	58
Kota Padang	554,99	392,98	71	400,48	364,5	91
Kab. Bekasi	829	745,4	89	915,43	939,35	102
Belanja Bantuan Sosial						
Kota Medan	74,26	56,90	76	80,90	72,22	89
Kota Padang	12,57	9,71	77	20,03	16,49	82
Kab. Bekasi	52,07	60,97	111	64,77	23,00	35

Data menunjukkan dinamika yang kontras antara belanja modal dan belanja bantuan sosial di beberapa daerah. Pada belanja modal, terlihat bahwa tahun 2023 tidak selalu menunjukkan peningkatan kinerja, bahkan beberapa daerah mengalami penurunan realisasi. Kota Medan mengalami penurunan tajam dari 94% (2022) menjadi hanya 58% (2023), sementara Kota Padang justru membaik dari 71% menjadi 91%. Kab. Bekasi menunjukkan kinerja positif dengan realisasi 102% pada 2023, meningkat dari 89% pada 2022.

Kemudian Data belanja bantuan sosial tahun non-Pilkada (2022) dan pra-Pilkada (2023) menunjukkan pola yang heterogen antar daerah. Kota Medan dan Kota Padang mengalami peningkatan realisasi bansos dari masing-masing 76% menjadi 89% dan dari 77% menjadi 82%, seiring dengan kenaikan alokasi anggaran pada tahun pra-Pilkada. Sebaliknya, Kabupaten Bekasi menunjukkan penurunan tajam realisasi dari 111% pada 2022 menjadi hanya 35% pada 2023 meskipun anggaran meningkat. Perbedaan pola ini mengindikasikan bahwa

belanja bantuan sosial bersifat sangat fleksibel dan sensitif terhadap dinamika politik lokal, sehingga relevan dianalisis dalam kerangka *political budget cycle* untuk mengidentifikasi indikasi perilaku oportunistik kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024 [9]. Pola tersebut menggambarkan perbedaan kecenderungan realisasi antarjenis belanja, di mana belanja bantuan sosial pada beberapa daerah menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi, sementara belanja modal mengalami variasi realisasi antarwilayah. Perbedaan ini mengindikasikan adanya karakteristik pengelolaan dan prioritas fiskal yang tidak seragam, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks perilaku anggaran pemerintah daerah.

Perbedaan antar daerah tersebut menunjukkan bahwa perubahan alokasi dan realisasi baik pada belanja modal maupun belanja bantuan sosial tidak bersifat seragam dan sangat dipengaruhi oleh prioritas anggaran lokal serta kapasitas pelaksanaannya. Secara teori, dinamika ini sejalan dengan literatur *political budget cycles* yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menyesuaikan komposisi anggarannya baik melalui percepatan proyek fisik maupun peningkatan penyaluran bantuan sosial untuk mencapai tujuan strategis pada periode menjelang pemilu. [10]. Heterogenitas temuan juga menunjukkan adanya faktor institusional dan teknis seperti kapasitas lelang, ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), spesifik wilayah, spesifik ukuran ekonomi dan hambatan administrasi yang memoderasi perilaku tersebut [11][12]. Oleh karena itu, fenomena antar daerah dalam hal ini naiknya anggaran tanpa serapan seimbang pada beberapa daerah dan penyerapan melebihi anggaran di daerah lain menjadi

dasar kuat untuk penelitian kausal komparatif yang menguji apakah perilaku oportunistik kepala daerah secara sistematis memengaruhi dinamika belanja modal dan belanja bantuan sosial pada tahun non-Pilkada dibanding tahun pra-Pilkada.

Transparansi keuangan dan potensi perilaku oportunistik dalam pemerintah daerah menjadi isu krusial sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya publik dalam kerangka desentralisasi [13][14]. Dalam konteks ini, dinamika realisasi anggaran daerah khususnya belanja modal dan belanja bantuan sosial, menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah. Pada beberapa daerah realisasi belanja modal mengalami kenaikan, namun di daerah lain justru menurun menjelang periode pra-Pilkada. Pola serupa juga muncul pada belanja bantuan sosial, di mana sejumlah daerah menunjukkan peningkatan realisasi, sedangkan daerah lainnya relatif stabil [15]. Ketidakteraturan pola ini menandakan bahwa respons fiskal daerah menjelang Pilkada tidak bersifat seragam, sehingga penting untuk menelaah apakah dinamika tersebut berkaitan dengan perilaku oportunistik kepala daerah atau dipengaruhi oleh karakteristik fiskal dan kebutuhan sosial masing-masing daerah. Dengan demikian, pengujian terhadap belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersamaan menjadi relevan untuk memahami perilaku anggaran pemerintah daerah menjelang Pilkada tahun 2024.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berpotensi memengaruhi pola alokasi anggaran dan realisasi proyek pembangunan di pemerintah daerah [16]. Di satu sisi, Pilkada menimbulkan beban fiskal yang signifikan karena membutuhkan

pembiayaan besar untuk berbagai tahapan penyelenggaraan [17][18]. Di sisi lain, petahana cenderung meningkatkan belanja modal untuk merealisasikan proyek fisik sebagai strategi memperoleh dukungan politik [19]. Praktik ini sering melibatkan pemanfaatan jaringan kedekatan politik maupun tim sukses dalam pelaksanaan proyek pembangunan [20][21].

Fenomena politisasi belanja modal dan belanja bantuan sosial menjelang pra-Pilkada menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai perilaku oportunistik kepala daerah dalam kerangka *political budget cycle* (PBC). PBC menjelaskan bagaimana pejabat publik mengalihkan anggaran ke pos-pos bernilai politis demi keuntungan elektoral, yang diperkuat oleh pengeluaran diskresioner serta pengaruh koneksi politik atau dinasti [22][23]. Meskipun mekanisme penyusunan APBD telah diatur secara formal, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan kewenangan anggaran oleh kepala daerah [24].

Pemerintah dapat berperilaku oportunistik dan berpotensi tidak efisien menjelang pemilu, dengan menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif untuk meningkatkan output dan mengurangi pengangguran demi mendapatkan dukungan dari pemilih [25]. Pemerintah daerah yang bersikap oportunistik cenderung meningkatkan belanja menjelang pemilu sebagai strategi untuk menampilkan citra kompeten di mata publik. Pola belanja yang demikian sering kali memicu terjadinya defisit anggaran pada tahun pemilu, karena adanya perbedaan antara pendapatan yang diproyeksikan dengan realisasi pengeluaran dan saldo anggaran yang tersedia [26]. Berdasarkan asumsi bahwa pemilih

cenderung tidak menyukai pemerintahan yang boros, maka petahana sering melakukan penyesuaian komposisi anggaran secara oportunistik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana tindakan oportunistik tersebut berhubungan dengan peluang petahana memperoleh hasil pemilu yang lebih menguntungkan [27].

Kemudian, semenjak penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) terjadi pergeseran paradigma pengelolaan keuangan daerah dari sekadar ekspansi fiskal menuju peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada efektivitas, keberlanjutan, dan dampak kesejahteraan. Dalam kerangka HKPD, belanja daerah tidak lagi dinilai hanya dari besarnya alokasi, tetapi dari komposisi, prioritas, dan akuntabilitas penggunaannya, khususnya pada belanja yang bersifat diskresioner dan rentan dimanfaatkan untuk kepentingan non-pembangunan [28]. Kondisi ini menjadi semakin krusial dalam konteks tahun politik dan Pilkada Serentak 2024, ketika risiko distorsi kualitas belanja akibat insentif elektoral cenderung meningkat. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji dinamika belanja modal dan belanja bantuan sosial pada periode pra-Pilkada menjadi mendesak, karena mampu memberikan bukti empiris apakah arah kebijakan HKPD dalam mendorong belanja yang berkualitas telah sejalan dengan praktik penganggaran daerah, atau justru masih dihadapkan pada tantangan perilaku oportunistik yang berpotensi menurunkan kualitas belanja publik.

Political Budget Cycle mencerminkan manipulasi strategis kebijakan fiskal oleh petahana untuk meningkatkan peluang terpilih kembali, yang umumnya

diwujudkan melalui peningkatan belanja pemerintah, pelebaran defisit, atau penurunan pajak pada tahun politik [29][30]. Praktik ini sering diarahkan pada pos-pos yang berdampak langsung terhadap pemilih, khususnya belanja bantuan sosial, sebagai instrumen untuk memperkuat popularitas menjelang pemilu [31][32]. Perilaku oportunistik tersebut berpotensi mendistorsi prioritas kebijakan publik dan menurunkan kualitas pengelolaan fiskal, sehingga pemahaman terhadap dinamika PBC menjadi krusial guna memastikan kebijakan fiskal tidak semata-mata didorong oleh kepentingan elektoral jangka pendek [33].

Penelitian mengenai perilaku oportunistik pejabat publik menunjukkan adanya *political budget cycle*, di mana *incumbents* cenderung meningkatkan pengeluaran pada periode pra-pemilu, terutama pada pos yang manfaatnya cepat terlihat oleh publik, dengan efek yang lebih lemah di negara dengan pengendalian korupsi yang kuat [19]. Kajian lain menegaskan bahwa tipe kepemimpinan populis dan lemahnya institusi dapat memperkuat intensitas siklus anggaran, sehingga variasinya sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan kualitas pengawasan di daerah [34]. Pada level provinsi maupun kabupaten/kota, bukti empiris memperlihatkan heterogenitas strategi anggaran, di mana sebagian daerah mengakselerasi belanja modal, sementara daerah lain mengalihkan fokus ke pos belanja yang lebih konsumtif atau langsung dirasakan masyarakat, bergantung pada struktur pendanaan, mekanisme lelang, dan sifat alokasi yang berpotensi dipolitisi [35].

Dalam konteks Indonesia, temuan empiris juga bercampur, dengan beberapa studi menunjukkan peningkatan belanja hibah dan bantuan keuangan

menjelang Pilkada, tetapi pola pada belanja modal tidak selalu konsisten dan berbeda antar daerah, sehingga diperlukan kajian yang lebih terfokus pada perilaku investasi pemerintah daerah [2][4]. Selain itu, literatur mengenai korupsi lokal menunjukkan bahwa tingkat kebocoran anggaran, koneksi politik, dan efektivitas pengawasan turut memengaruhi perubahan pola pengeluaran, sehingga dampak oportunistik terhadap belanja modal kemungkinan dimediasi oleh faktor-faktor tersebut [36].

Literatur menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial bersifat sangat sensitif secara politis dan sering dimanfaatkan dalam kontestasi elektoral. Di Indonesia, belanja bansos cenderung meningkat signifikan pada tahun pra-pemilu, meskipun dampaknya pada tahun pemilihan tidak konsisten antar daerah [37]. Karena manfaatnya langsung dirasakan pemilih, bansos mudah dipolitisasi dan terbukti berpengaruh positif terhadap perolehan suara petahana dalam Pilkada [38]. Hal ini menegaskan peran bansos sebagai sinyal kinerja sekaligus instrumen elektoral, meskipun efektivitasnya dapat melemah dalam kondisi kompetisi politik yang ketat akibat strategi kontra dari kandidat lawan [39].

Fenomena dinamika belanja modal dan belanja bantuan sosial menjelang Pilkada juga dapat dijelaskan melalui *Public Choice Theory*, Median Voter Model, dan Leviathan Model. *Public Choice Theory* menegaskan bahwa kepala daerah bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan elektoral melalui pemanfaatan kewenangan fiskal. Median Voter Model menjelaskan pengalihan belanja ke pos yang bersifat *visible* dan langsung dirasakan pemilih, sedangkan Leviathan Model menekankan kecenderungan eksekutif memperluas belanja

diskresioner demi kepentingan politik jangka pendek. Ketiga perspektif ini memperkuat *political budget cycle* dengan menunjukkan bahwa perbedaan belanja antarperiode mencerminkan interaksi antara preferensi pemilih, kalkulasi politik petahana, dan ruang diskresi fiskal pemerintah daerah.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai perilaku anggaran pemerintah daerah menjelang Pilkada masih menyisakan beberapa kesenjangan penting. Pertama, bukti empiris terkait dinamika belanja modal dalam konteks *political budget cycle* masih terbatas, karena sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti belanja operasional atau hibah, bukan belanja modal yang secara teori termasuk *less visible expenditure* dan dapat mengalami perlambatan atau percepatan bergantung pada insentif elektoral. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menguji kembali bagaimana belanja modal bergerak pada periode non-Pilkada (2022) dan pra-Pilkada (2023).

Kedua, penelitian sebelumnya umumnya bersifat deskriptif atau korelasional, sehingga belum banyak studi yang menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif untuk menguji perbedaan antarperiode sebagaimana dianjurkan dalam literatur *political budget cycle* yang menekankan pentingnya analisis sebelum–sesudah untuk mendeteksi perilaku oportunistik.

Ketiga, banyak studi terdahulu hanya mengambil sampel wilayah terbatas, sehingga temuannya bersifat parsial dan kurang mewakili variasi fiskal nasional. Oleh karena itu, penggunaan seluruh kabupaten/kota di Indonesia diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku anggaran daerah menjelang Pilkada.

Keempat, masuknya belanja bantuan sosial sebagai variabel tambahan semakin memperluas gap penelitian, karena literatur menunjukkan bahwa bansos merupakan *highly visible expenditure* yang sangat responsif terhadap insentif elektoral, namun belum banyak riset yang secara simultan membandingkan pergerakan belanja modal dan belanja bantuan sosial pada periode menjelang Pilkada Serentak 2024. Padahal, menurut teori *political budget cycle*, kedua jenis belanja dapat menunjukkan pola yang berbeda karena karakteristik visibilitas dan manfaatnya bagi pemilih.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perbedaan belanja modal dan belanja bantuan sosial antara tahun non-Pilkada dan pra-Pilkada secara nasional menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperjelas indikasi perilaku oportunistik dalam belanja modal dan belanja bantuan sosial serta memperkaya pemahaman mengenai *political budget cycle* pada level pemerintahan daerah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan anggaran belanja modal antara tahun non-Pilkada dengan tahun pra-Pilkada pada pemerintah daerah di Indonesia?

2. Apakah terdapat perbedaan anggaran belanja modal antara tahun non-Pilkada dengan tahun pra-Pilkada pada daerah yang kepala daerah nya mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024?
3. Apakah terdapat perbedaan anggaran belanja bantuan sosial antara tahun non-Pilkada dengan tahun pra-Pilkada pada pemerintah daerah di Indonesia?
4. Apakah terdapat perbedaan anggaran belanja bantuan sosial antara tahun non-Pilkada dengan tahun pra-Pilkada pada daerah yang kepala daerah nya mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan anggaran belanja modal antara tahun non-Pilkada dan tahun pra-Pilkada pada pemerintah daerah di Indonesia.
2. Menganalisis perbedaan anggaran belanja modal antara tahun non-Pilkada dan tahun pra-Pilkada pada pemerintah daerah yang kepala daerahnya mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024.
3. Menganalisis perbedaan anggaran belanja bantuan sosial antara tahun non-Pilkada dan tahun pra-Pilkada pada pemerintah daerah di Indonesia.
4. Menganalisis perbedaan anggaran belanja bantuan sosial antara tahun non-Pilkada dan tahun pra-Pilkada pada pemerintah daerah yang kepala daerahnya mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian seperti yang dinyatakan di atas, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik dalam lingkup pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam konteks pelaksanaan Pembangunan dan kebijakan publik.

1. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian *political budget cycle* pada level pemerintah daerah. Dengan menggunakan data terbaru tahun 2022 (non-Pilkada) dan 2023 (pra-Pilkada), penelitian ini mengisi kekosongan empiris karena sebagian besar riset sebelumnya berfokus pada periode Pilkada terdahulu atau wilayah terbatas. Selain menelaah belanja modal yang selama ini kurang disorot, penelitian ini juga memasukkan belanja bantuan sosial sebagai variabel yang secara teoretis *termasuk highly visible expenditure* dan sangat responsif terhadap insentif elektoral.

Kombinasi kedua variabel tersebut memperluas pemahaman mengenai bagaimana berbagai jenis belanja daerah bereaksi terhadap tekanan politik menjelang Pilkada. Dari sisi metodologi, penelitian ini menawarkan pendekatan kuantitatif komparatif untuk menguji perbedaan antarperiode dan antarwilayah secara sistematis, serta memperkenalkan indikator oportunistik politik yang lebih terukur melalui status dan peluang elektoral petahana. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai

perilaku fiskal oportunistik, tata kelola keuangan publik, serta akuntabilitas fiskal pemerintah daerah.

2. Manfaat bagi pelaksanaan pengembangan dan kebijakan publik.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan anggaran pada tahun politik, baik terkait belanja modal maupun belanja bantuan sosial. Temuan empiris mengenai dinamika kedua jenis belanja ini dapat menjadi dasar penyusunan pedoman pengendalian anggaran, termasuk mekanisme pembatasan perubahan anggaran, penguatan verifikasi proyek, serta pengawasan penyaluran bantuan sosial agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan elektoral.

Penelitian ini juga berpotensi menjadi instrumen deteksi dini terhadap perilaku oportunistik kepala daerah, sehingga mendukung pengawasan tematik oleh lembaga seperti BPK dan KPK terkait percepatan proyek fisik maupun intensifikasi bansos menjelang Pilkada. Di tingkat lokal, hasil penelitian dapat digunakan oleh DPRD dan masyarakat sipil untuk memperkuat fungsi pengawasan APBD, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam membedakan antara belanja yang produktif secara jangka panjang dan belanja yang berorientasi elektoral.

Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat pemilih dengan menyediakan informasi objektif mengenai pola belanja pemerintah daerah, sehingga mendorong keputusan elektoral yang lebih rasional.

Rekomendasi penelitian ini juga dapat mendukung perbaikan tata kelola melalui transparansi anggaran, publikasi progres proyek, serta penguatan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai praktis yang signifikan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan minim bias politik.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis belanja modal dan belanja bantuan sosial pemerintah daerah di Indonesia dalam konteks menjelang Pilkada Serentak 2024. Cakupan penelitian meliputi seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2022 (non-Pilkada) dan 2023 (pra-Pilkada) untuk memperoleh gambaran komparatif mengenai dinamika kedua jenis belanja tersebut.

Fokus analisis diarahkan pada potensi perilaku oportunistik kepala daerah, terutama petahana yang mencalonkan diri kembali, serta bagaimana insentif elektoral tersebut tercermin dalam perubahan pola anggaran belanja modal maupun belanja bantuan sosial. Variabel utama penelitian ini meliputi:

1. Status politik kepala daerah (petahana yang maju kembali)
2. Belanja modal serta belanja bantuan sosial, yang diukur berdasarkan besaran anggaran pada dua tahun pengamatan.

Metode analisis meliputi statistik deskriptif dan uji beda (*Paired sample t-test*) untuk menguji perbedaan antarperiode dan antarjenis daerah. Penelitian dibatasi pada dua jenis belanja tersebut dan tidak mencakup pos anggaran lain

seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau hibah agar analisis tetap terfokus pada belanja yang relevan secara teori dengan *political budget cycle* dan visibilitas publik. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari *website* resmi berupa postur APBD dan status pencalonan *incumbents*.

